



PERTANGGUNG JAWABAN BANK DAN PPAT ATAS HILANGNYA SERTIPIKAT HAK MILIK YANG MENJADI JAMINAN KREDIT

PADA SAAT PROSES PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN
WIWIED NUGRAHANING, Dr. Taufiq El Rahman., S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**PERTANGGUNGJAWABAN BANK DAN PPAT ATAS HILANGNYA
SERTIPIKAT HAK MILIK YANG MENJADI JAMINAN KREDIT PADA
SAAT PROSES PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN**

**(studi kasus dalam perkara antara
PPAT R dan BANK M
di kota Kendari)**

Wiwied Nugrahaning Arum Widyastuti dan Taufiq El Rahman

INTISARI

Untuk mengetahui akibat hukum terhadap bank selaku kreditur yang tidak mengembalikan sertipikat hak milik atas tanah kepada debitur yang diperuntukan sebagai jaminan kredit dan menganalisis bagaimana bentuk tanggungjawab PPAT atas gagalnya pemasangan hak tanggungan karena hilangnya objek yang menjadi jaminan kredit tersebut

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara dengan responden dan narasumber. Studi dokumenter dilakukan untuk memperoleh data berupa dokumen dan arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum apabila bank selaku kreditur tidak mengembalikan sertipikat hak milik atas tanah kepada debitur yang diperuntukan sebagai jaminan kredit yakni tertuang secara normatif sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan hanyalah berupa Sanksi Administratif saja seperti yang tercantum dalam pasal 53. Sedangkan peran PPAT yang bertanggungjawab atas gagalnya pemasangan hak tanggungan karena hilangnya objek yang menjadi jaminan yakni hanya berupa penggantian kerugian materiil dengan memberikan sejumlah uang tunai kepada nasabah debitur, bentuk pertanggungjawaban lainnya juga bisa berupa permohonan penerbitan sertifikat pengganti/baru dengan segala biaya dalam mengurus sertifikat pengganti tersebut ditanggung mandiri oleh PPAT itu sendiri. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Kode Etik PPAT Pasal 3 huruf f yang isinya menyatakan bahwa PPAT harus bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak.

Kata Kunci : Bank, PPAT, Sertifikat Hak Milik, Jaminan Kredit, Proses Pemasangan Hak Tanggungan.



PERTANGGUNG JAWABAN BANK DAN PPAT ATAS HILANGNYA SERTIPIKAT HAK MILIK YANG MENJADI JAMINAN KREDIT

PADA SAAT PROSES PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN
WIWIED NUGRAHANING, Dr. Taufiq El Rahman., S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**BANK AND PPAT LIABILITY FOR THE LOSS OF PROPERTY RIGHTS
CERTIFICATE THAT BECOMES CREDIT GUARANTEE DURING THE
INSTALLATION PROCESS OF DEPENDENT RIGHTS**

**(case studies in cases between
PPAT R and BANK M
in kendari city)**

Wiwied Nugrahaning Arum Widyastuti and Taufiq El Rahman

ABSTRACT

To find out the legal consequences of the bank as a creditor who does not return property rights to the debtor that is intended as a credit guarantee and analyze how the form of PPAT responsibility for the failure of the installation of dependent rights due to the loss of the object that became the credit guarantee

Literature research was conducted to examine primary and secondary legal materials. To obtain primary data conducted interviews with respondents and resource persons. Documentary studies were conducted to obtain data in the form of documents and archives related to the problems studied.

The results showed that a legal ruling if the bank as a creditor does not return a certificate of property rights to the land to the debtor that is intended as a credit guarantee that is contained in the normative as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection of the Financial Services Sector is only in the form of Administrative Sanctions as stated in article 53. While the role of PPAT responsible for the failure of the installation of dependent rights due to the loss of the object that becomes collateral is only in the form of material damages by providing some cash to the debtor's customers, other forms of liability can also be in the form of application for issuance of a replacement certificate / new with all costs in managing the replacement certificate is borne independently by the PPAT itself. As stated in the Regulation of the Code of Ethics PPAT Article 3 letter f which states that PPAT must work with a sense of responsibility, independent, honest, and impartial.

Keywords: Bank, PPAT, Certificate of Property, Credit Guarantee, Installation Process of Dependent Right